

**STRATEGI JARINGAN PEDULI PEREMPUAN
SUMATERA BARAT DALAM MEREALISASIKAN
PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)**

SKRIPSI



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

**STRATEGI JARINGAN PEDULI PEREMPUAN
SUMATERA BARAT DALAM MEREALISASIKAN
PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

ABSTRAK

ABDIS SALLAM FAJRI, 1710813003, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Judul Skripsi: Strategi Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam Merealisasikan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Pembimbing: Dr. Jendrius, M.Si.

Penelitian ini membahas tentang strategi Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam mendorong pengesahan “UU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Indonesia masih belum menjadi ruang aman bagi perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terhitung 299.911 kasus kekerasan terjadi dengan korban adalah perempuan pada tahun 2020. Kemudian dari temuan tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2018, Sumatera Barat menduduki peringkat ketiga dengan 343 kasus asusila setelah Jawa Barat dengan 349 kasus dan Sulawesi Utara dengan 384 kasus di posisi teratas.

Sedangkan pada tahun 2019 dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan (WCC Nurani Perempuan) menyebutkan pola kejahatan dalam bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak mencapai seratus lima kasus selama tahun 2019. Pada November 2020 WCC Nurani Perempuan melaporkan ada delapan puluh kasus kekerasan yang dialami perempuan, kasus tertinggi kekerasan seksual ada di kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi gerakan yang mendukung RUU P-KS di Sumatera Barat dan mengidentifikasi desain dalam menentukan strategi gerakan sosial yang dirumuskan oleh Jaringan Peduli Perempuan di Sumatera Barat (JPP SUMBAR).

Mengingat perjalanan RUU P-KS menemui kendala seperti kurangnya keseriusan para pengambil kebijakan dalam pembahasannya dan khususnya di Sumatera Barat masih terjadi penolakan besar-besaran dari kalangan masyarakat mengenai ketidak samaan makna dan isi dari RUU P-KS tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial yaitu teori proses politik dari Douglas McAdam. Analisis yang digunakan adalah *analisis stakeholder engagement*. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dihasilkan diolah berdasarkan hasil wawancara mendalam, pengamatan, serta pengumpulan data primer dan sekunder.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan JPP SUMBAR lebih kepada pengorganisasian sebagai kekuatan politik. Peneliti menemukan strategi menarik seperti sidang rakyat se-Indonesia sebagai bentuk pertarungan wacana dengan pihak yang menolak RUU P-KS serta mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU P-KS. Namun, dalam pertarungan wacana, belum ada pertemuan antara mereka yang menolak dan mendukung RUU P-KS untuk menciptakan konfrontasi ide. Sehingga yang terjadi hanyalah penguatan jaringan dari masing-masing kelompok untuk menguasai wacana di Sumatera Barat.

Kata kunci: Strategi Gerakan, Kampanye, Pengesahan RUU P-KS

ABSTRACT

ABDIS SALLAM FAJRI, 1710813003, Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis Title: Strategy of the West Sumatran Women Care Network in Urging the Ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS). Supervisor: Dr. Jendrius, M.Si.

This study discusses the strategy of the West Sumatran women's care network in pressing for the ratification of the draft law on the elimination of sexual violence. Indonesia is still not a safety space for women. Based on Komnas Perempuan data, as many as 299,911 cases of violence against women occurred in 2020. Then from this data, it can be seen that sexual violence is evenly distributed in almost all parts of Indonesia, including in West Sumatra. Referring to data released by the Central Statistics Agency in 2018, West Sumatra ranked third with 343 immoral cases after West Java with 349 and North Sulawesi with 384 cases in the top position.

Meanwhile, in 2019, referring to data released by the Women's Crisis Center for Conscience of Women (WCC Conscience Women) it was stated that violence against women and children reached one hundred and five cases during 2019. In November 2020 WCC Conscience Women reported that there were eighty cases of violence against women, most occurred in the city of Padang with the highest cases of sexual violence.

In its journey, the P-KS Bill encountered obstacles such as the lack of seriousness of policy makers in its discussion and especially in West Sumatra, there was still a large-scale community regarding the unequal meaning and content of the P-KS Bill.

This study uses social movement theory, namely the political process theory of Douglas McAdam. The analysis used is stakeholder engagement analysis. In searching for data, the author uses qualitative methods, where the data is obtained from the results of in-depth interviews, observations, and secondary data collection. Keywords: Movement Strategy, campaign, Ratification of the P-KS Bill

The findings in this study indicate that the strategy used by JPP SUMBAR is more about organizing as a political force. Researchers found interesting strategies such as the people's assembly throughout Indonesia as a form of discourse battle with those who rejected the P-KS Bill and urged the DPR-RI to immediately ratify the P-KS Bill. However, in the discourse battle, there has been no meeting between those who reject and support the P-KS Bill to create a confrontation of ideas. So that what happened was only the strengthening of the network from each group to master the discourse in West Sumatra.

Keywords: Movement Strategy, Campaign, Ratification of the P-KS Bill